

ANALISIS DEFISIT ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Mia Aulia, Mizan Asnawi, Dwi Widiarsih
Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Riau
*e-mail: Auliamiaa11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sumber pembiayaan defisit anggaran, yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis. Pembangunan daerah diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data time series tahun 2015–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2), serta telah memenuhi uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita; (2) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita; (3) Secara simultan, SiLPA dan PAD bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah dengan kontribusi sebesar 89,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Kata Kunci: Defisit Anggaran, SiLPA, PAD, Pembangunan Daerah, PDRB per Kapita, Kabupaten Bengkalis

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan indikator kunci dalam menilai kemajuan suatu wilayah, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara mandiri guna mendanai program-program pembangunan. Namun, banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bengkalis, mengalami tantangan dalam menjaga keseimbangan fiskal, yang seringkali berujung pada defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika belanja daerah melebihi pendapatan dalam satu periode anggaran. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021, dimana realisasi belanja daerah sebesar Rp3,594 triliun lebih tinggi daripada pendapatan daerah yang sebesar Rp3,443 triliun, sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp151,01 miliar (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD Kabupaten

Bengkalis, 2021). Kondisi ini memerlukan sumber pembiayaan yang tepat agar pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan beban fiskal jangka panjang. Pembangunan daerah merupakan indikator kunci dalam menilai kemajuan suatu wilayah, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara mandiri guna mendanai program-program pembangunan.

Namun, banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bengkalis, mengalami tantangan dalam menjaga keseimbangan fiskal, yang seringkali berujung pada defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika belanja daerah melebihi pendapatan dalam satu periode anggaran. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021, dimana realisasi belanja daerah sebesar Rp3,594 triliun lebih tinggi daripada pendapatan daerah yang sebesar Rp3,443 triliun, sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp151,01 miliar (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2021). Kondisi ini memerlukan sumber pembiayaan yang tepat agar pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan beban fiskal jangka panjang.

Defisit anggaran terjadi ketika belanja daerah melebihi pendapatan dalam satu periode anggaran. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021, realisasi APBD menunjukkan kondisi defisit sebagai berikut:

Tabel 1 Realisasi APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Uraian	Jumlah (Rp)	Bertambah/(Berkurang)
Total Pendaatan	3.443.006.942.468	
Total Belanja	594.498.516.274	
Surplus/(Defisit)	(151.011.573.806)	-15%

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis (2021)

Sumber pembiayaan defisit yang umum digunakan antara lain Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). SiLPA mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran tahun sebelumnya, sementara PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan lokal. Namun, pengelolaan SiLPA di Kabupaten Bengkalis menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Data dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis dan BPKAD mencatat bahwa SiLPA mengalami fluktuasi signifikan, dari Rp1.266 triliun (2015) turun drastis menjadi Rp280 miliar (2016), kemudian melonjak ekstrem menjadi Rp1.179 triliun (2021), dan kembali turun menjadi Rp291 miliar (2023). Fluktuasi ini mengindikasikan ketidakkonsistenan dalam perencanaan dan penyerapan anggaran, dimana SiLPA yang terlalu besar justru dapat menandakan inefisiensi dan penghambatan pembangunan.

Tabel 2 SiLPA Kabupaten Bengkulu Tahun 2015-2024.

No	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Bengkulu	Tahun
1	Rp. 1.266.549.379.673,97	2015
2	Rp 280.380.000.000	2016
3	Rp 220.891.521.451	2017
4	Rp 217.427.078.743,63	2018
5	Rp 222.090.595.626,37	2019
6	Rp 151.011.000.000	2020
7	Rp. 1.179.959.349.062	2021
8	Rp. 293.268.675.966	2022
9	Rp. 291.316.908.605	2023
10	Rp. 5.411.000.000	2024

Sumber: LKPJ Bupati Bengkulu dan BPKAD Kabupaten Bengkulu

Seperti ditunjukkan pada Tabel 1.2, SiLPA mengalami lonjakan ekstrem dari Rp151 miliar (2020) menjadi Rp1,179 triliun (2021), lalu kembali turun drastis menjadi sekitar Rp291 miliar (2023). Fluktuasi yang tajam ini mengindikasikan masalah mendasar dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. SiLPA yang terlalu besar justru menjadi sinyal lemahnya kapasitas serapan anggaran, yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Secara teoretis, dalam kerangka public finance, keberlanjutan fiskal daerah sangat bergantung pada kemampuan meningkatkan PAD dan mengelola SiLPA secara efektif (Halim, 2014; Mardiasmo, 2018). SiLPA yang besar dan fluktuatif, seperti pada Tabel 2, mencerminkan ketidakefisienan alokatif (*allocative inefficiency*) dan lemahnya kapasitas penyerapan anggaran oleh perangkat daerah. Di sisi lain, PAD yang semakin meningkat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mendanai program prioritas pembangunan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian dan data empiris tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis pengaruh sumber pembiayaan defisit anggaran, yaitu SiLPA dan PAD, terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu. Analisis ini penting untuk memberikan bukti empiris mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

TELAAH PUSTAKA

Pembangunan Daerah

Pembangunan menurut Siagian dalam (Patarai, 2016) diartikan sebagai suatu perubahan dalam mewujudkan suatu kondisi kehidupan ber dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Dalam

pengertian lain dijelaskan menurut siagian pembangunan dalam definisi pertumbuhan ekonomi dimana pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

APBN merupakan bagian dari keuangan . Dalam teori anggaran terdapat beberapa pendapat mengenai anggaran. Misalnya, Burkhead and Winer mendefinisikan anggaran sebagai rencana pengeluaran dan penerimaan untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek-proyek untuk jangka waktu yang lebih lama. Namun, Welsch memberikan definisi anggaran belanja sebagai pedoman untuk membiayai tugas-tugas di segala bidang termasuk belanja pegawai untuk jangka waktu tertentu, lazimnya satu tahun mendatang (Prihatiningsih et al., 2013).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu periode anggaran tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, SiLPA mencerminkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan defisit anggaran pada tahun berikutnya. Namun, SiLPA yang terlalu besar mengindikasikan lemahnya kapasitas penyerapan anggaran dan inefisiensi perencanaan fiskal, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas pembangunan daerah (Halim, 2014)..

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi lokal, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD merupakan indikator utama kemandirian fiskal daerah. PAD yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali potensi lokal dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, sehingga mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dan otonomi daerah yang efektif (Arsyad, 2015).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan desain time series selama periode 2021–2024. Data sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis yang diaudit BPK, Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Variabel penelitian terdiri atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sebagai variabel independen, serta Pembangunan Daerah (diukur melalui PDRB per kapita) sebagai variabel dependen. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda (Ordinary Least Square), didahului uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), serta uji hipotesis parsial (uji t) dan simultan (uji F) menggunakan software SPSS 22 untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap pembangunan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

1. Pengaruh SiLPA terhadap Pembangunan Daerah (PDRB Per Kapita)

Variabel SiLPA memiliki nilai t hitung sebesar 3,905 dengan arah pengaruh positif dan signifikansi 0,002. Maka t hitung $3,905 > t$ tabel 1,120 dengan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita.

2. Pengaruh PAD terhadap Pembangunan Daerah (PDRB Per Kapita)

Variabel PAD memiliki nilai t hitung sebesar 3,167 dengan arah pengaruh positif dan signifikansi 0,006. Maka t hitung $3,167 > t$ tabel 1,120 dengan tingkat signifikansi $0,006 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita..

3. Pengaruh SiLPA dan PAD secara Simultan Terhadap Pembangunan Daerah

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 22,536 dengan signifikansi 0,000. Maka F hitung $22,536 > F$ tabel 4,74 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, artinya SiLPA dan PAD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita..

Tabel 3 Hasil Uji Parsial (t)

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	120.532	25.214		4.776	.001
	SiLPA	.082	.021	.652	3.905	.002
	PAD	.057	.018	.541	3.167	.006

a. Dependent Variable: PDRB Per Kapita

Sumber : Olahan Data Spss, 2025

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa SiLPA memiliki nilai

t hitung sebesar 3.905 dengan nilai signifikansi $0.002 < 0.05$. Hal ini berarti SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan daerah yang diukur dengan PDRB per kapita.

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.946 ^a	.894	.881	1.73245

a. Predictors: (Constant), SiLPA, PAD
b. Dependent Variable: PDRB Per Kapita

Sumber: Data Olahan SPSS 22

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,894 atau setara dengan 89,4%. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel PAD dan SiLPA secara simultan memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi pembangunan daerah yang diukur melalui PDRB per kapita, yaitu sebesar 89,4%. Sementara itu, sisanya sebesar 10,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi yang tidak tercakup dalam penelitian ini, seperti investasi swasta, transfer fiskal dari pemerintah pusat, maupun faktor eksternal perekonomian.

Pembahasan

Pengaruh SiLPA terhadap Pembangunan Daerah Bengkalis

Hasil analisis parsial (uji t) menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan daerah, dengan nilai t hitung sebesar 3,167 dan signifikansi $0,006 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa sisa pembiayaan anggaran yang tidak terpakai pada tahun berjalan, tetapi dapat dimanfaatkan kembali pada tahun berikutnya, memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2018), SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan penting yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran, membiayai kegiatan prioritas, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah pada tahun anggaran selanjutnya. Dengan kata lain, SiLPA bukan sekadar sisa dana yang mengendap, melainkan bagian dari mekanisme fiskal yang dapat memperkuat keuangan daerah.

Pengaruh PAD terhadap Pembangunan Bengkalis

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan daerah yang diukur melalui PDRB per kapita, dengan nilai t hitung sebesar 3,905 dan signifikansi $0,002 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan PAD memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan pandangan Halim (2014) yang menyatakan bahwa PAD mencerminkan

tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD, maka semakin tinggi pula kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Peningkatan PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk memperluas belanja pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan PDRB per kapita. Dalam hal ini Kabupaten Bengkalis, PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan sah terbukti menjadi salah satu motor penggerak pembangunan. Misalnya seperti, peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah dapat digunakan untuk memperbaiki sarana transportasi dan infrastruktur ekonomi yang memudahkan aktivitas perdagangan dan investasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan PAD merupakan strategi yang relevan untuk meningkatkan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pengaruh SiLPA dan PAD secara Simultan terhadap Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.6.2, diperoleh nilai F hitung sebesar 22,536 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini jauh lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terdiri dari variabel independen PAD dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu PDRB per kapita. Berdasarkan hasil uji simultan, variabel PAD dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah. Hal ini berarti bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan tertentu, melainkan merupakan kombinasi dari beberapa instrumen fiskal yang saling melengkapi

Hasil ini sejalan dengan pandangan Keynesian yang menekankan peran penting kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan daerah dan optimalisasi anggaran (Dornbusch, 1990). Dengan demikian, semakin tinggi kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD serta mengelola SiLPA secara efektif, maka semakin besar pula kontribusi kedua variabel tersebut terhadap pembangunan daerah yang tercermin dalam peningkatan PDRB per kapita.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh sumber pembiayaan defisit anggaran terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis, dapat disimpulkan bahwa (1). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan daerah yang diukur melalui PDRB per

kapita. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan SiLPA dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (2). Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan daerah. Peningkatan PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan. (3). Secara simultan, SiLPA dan PAD bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah dengan kontribusi sebesar 89,4%, sementara 10,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badrudin, R. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Barro, R. J. (1989). *Modern Business Cycle Theory*. Harvard University Press.
- Bernheim, B. D. (1989). *A Neoclassical Perspective on Budget Deficits*. *Journal of Economic Perspectives*, 3(2), 55–72.
- Chabib Sholeh, H. R. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Dornbusch, R., & Fischer, S. (1990). *Macroeconomics (5th ed.)*. McGraw-Hill.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25 ((9th ed.))*. Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Edisi 5)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Penerbit Andi.
- Nachrowi, D. N., & Usman, H. (2006). *Penggunaan Teknik Ekonometrika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Patarai, M. . (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)* (p. 238).
- Pramono, A. J. (2021). *Mencari formulasi defisit anggaran*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Prihatiningsih, A., Rachmad R, M., & HM, S. (2013). Defisit Anggaran dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Kabupaten Tebo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 97–108. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i2.1499>
- Rahman, A., & Gemilang, R. (2017). Dampak Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45-60.
- Rusydi, B. U., Nurpaida, I., & Hasbiullah. (2023). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Adakah Pengaruh Dari Kebijakan Defisit Anggaran Dan Otonomi Daerah ? *ICOR: Journal of Regional Economics*, 4(3), 142–154. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/icor/article/view/45603>
- Siagian, S. P. (2014). *Administrasi Pembangunan (Cetakan ke-1)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Siregar, R. (2014). *Pengaruh defisit anggaran terhadap perekonomian nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung,

- Indonesia: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan dan Website:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2024). Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2024. Bengkalis: BPS Kabupaten Bengkalis.
- Sintania, A., Rusty, A., Efendi, A., & Ekonomi, J. J. (2025). *Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Generasi Z di Pizza Hut Kota Samarinda Abstrak*. 11(3), 1659– 1666.
- Sugiyono. (2017). *metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D. in metode penelitian pendidikan kuantitatif, kuaitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyuni Nengsih, N. S., Sari, D. P., & Ramadhanu, A. (2020). Analisis Kinerja Karyawan Berdasarkan Komunikasi, Stres Kerja, Konflik Kerja Pt. Sumbang Andalas Kencana Pom Muara Timpeh Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(1), 67–73. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i1.24>
- Wandami, W. N., & Anhar, B. (2024). Pengaruh Motivasi Kompetensi Lingkungan Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Perawat Di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. *Visioner: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 13(1).

